

Aktivisme Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Bali Tahun 1956-1965

Ufiya Amirah¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Gede Indra Pramana³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ufiyaamirah@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², indraprama@unud.ac.id³

ABSTRAK

This study aims to explain about Gerwani's activism for the rights of the people, especially Balinese women in 1956-1965. The end of Soekarno's era democratic regime, also ended the greatness of the left political wing in Indonesia. Communist forces were destroyed down to the grassroots, including Gerwani. Gerwani's contribution to building the nation, especially their participation in struggling for women's rights, has disappeared, and has not been written down in history. To further discuss these activities, the researcher uses theory of Marxist feminism by Lise Vogel, and is supported by the conceptual framework of activism and socialist feminist movements. The research method used is a qualitative research method based on literature study. This research found that Gerwani Bali's activism in 1956-1965 included struggles in the sector of political-economy and socio-cultural action. In the political-economic sector, Gerwani Bali has participated in the struggle for land policy reform. And in social-cultural action, Gerwani Bali built Melati kindergartens, child care foundations in markets, art education centers, and advocated for sexual violence cases in Badung.

Keywords: Gerwani Bali, Activism, Socialist Feminist Movement.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjuangan perempuan di Indonesia tidak lepas dari perlawanan terhadap budaya feodal-patriarki dan imperialisme penjajah. Pada masa kolonialisme tepatnya tanggal 22-25 Desember 1928 (kelak diperingati sebagai 'Hari Ibu' oleh rezim Soeharto), sebanyak 30 organisasi perempuan yang berjumlah 1000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia bertemu dalam rangka menyelenggarakan Kongres Perempuan Pertama. Pertemuan ini erat kaitannya dengan kepentingan nasionalisme dan membebaskan diri dari kolonialisme Belanda. Dalam kongres

tersebut, diidentifikasi tiga masalah utama perempuan yaitu akses pendidikan, soal perkawinan, dan poligami (Aripurnami, 2013: 13-14).

Pasca kolonialisme, ditemukan dalam berbagai catatan sejarah bahwa Gerwani merupakan organisasi perempuan dengan simpatisan terbesar, memiliki basis yang mengakar, militan, dan progresif. Dalam dua periode demokrasi di Indonesia yakni periode demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dibawah rezim Soekarno, dari tahun 1940an hingga 1965, Gerwani mampu

mengemuka secara sosial dan politik (Arivia, 2017: 11). Gerwani populer di kalangan akar rumput karena gerakannya berpusat tidak terbatas pada kepentingan reformasi perkawinan, namun juga berjuang untuk kemerdekaan nasional dan sosialisme (Wieringa, 1999: 280-281). Sebagai gerakan perempuan berbasis massa, Gerwani memperluas pengaruhnya ke berbagai daerah termasuk Bali.

Berakhirnya rezim demokrasi terpimpin Soekarno, turut mengakhiri kejayaan sayap politik kiri di Indonesia. Memasuki era kekuasaan Soeharto, kekuatan komunis dihancurkan hingga ke akar rumput—tidak terkecuali Gerwani. Organisasi perempuan progresif tersebut dituduh bersekongkol dengan PKI atas peristiwa kup 65 di Lubang Buaya, Jakarta. Kontribusi Gerwani dalam membangun bangsa khususnya peran serta mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan menjadi lenyap, tidak tertulis dalam sejarah (Arivia, 2017: 11). Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting untuk mendokumentasikan kembali aktivisme Gerwani di Bali tahun 1956-1965 dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan perempuan di Bali.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivisme Gerwani Bali tahun 1956-1965?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam aktivisme Gerwani Bali tahun 1956-1965

dalam mengakomodir kepentingan massa luas khususnya hak-hak-hak perempuan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam menganalisis aksi militan Gerwani di Bali, penulis mengkaji pustaka terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, riset yang ditulis Rizqi Irza Affi dan Sofyan Kristianwantoni berjudul *Gerwani dalam Pergulatan Ideologi Komunis Tahun 1950-1965* dalam Shantet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora (2019). Riset ini menunjukkan bahwa PKI memiliki pengaruh yang besar atas Gerwani. Pada Kongres I Gerwis tahun 1951 di Surabaya, PKI meminta Gerwis bersikap kompromi dengan pemerintahan Soekarno dan pengorganisasian bersifat *down-top*. Kongres II pada tahun 1954 di Jakarta menghasilkan kesepakatan tuntutan anti imperialisme dan mendukung penumpasan Darul Islam—anti komunis. Pada Pemilu 1955, enam anggota Gerwani yang juga merupakan kader PKI terpilih menjadi anggota legislatif yaitu Umi Sardjono, Nyonya Mugdigdo, Maemunah, Suharti Suwarno, Salawati Dawud, dan Suwardiningsih. Kongres III tahun 1957 di Surakarta menetapkan Gerwani terlibat dalam pembebasan Irian Barat. Dan Kongres IV (terakhir) tahun 1964, Gerwani mendukung penuh rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Katharine McGrogan berjudul *Indonesian Women, The Women's International Democratic Federation and the Struggle for 'Women's Rights' 1946-1965*, dalam Indonesia and Malay World (2012). Artikel ini

menjelaskan peran Gerwani di dalam gerakan Federasi Wanita Demokrasi Internasional (WIDF). Gerwani cenderung dekat secara ideologis dengan WIDF yang berhaluan feminis-komunis. Sebagai partisipan di WIDF, Gerwani berkontribusi dalam perumusan kepentingan pemenuhan hak-hak petani perempuan di desa mengingat perempuan dengan buta huruf tertinggi ada di desa sehingga perlu memperluas pembangunan taman kanak-kanak di berbagai pelosok.

Ketiga, penelitian Saskia E. Wieringa berjudul *Two Indonesian Women's Organizations: Gerwani and the PKK* dalam *Bulletin of Concerned Asian Scholars* (2019). Artikel ini mengkomparasi antara Gerwani pada masa orde lama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pasca Soekarno tumbang. Gerwani merupakan organisasi perempuan sayap kiri yang menuntut perubahan radikal dalam pembentukan negara sosialis-demokratis dan masyarakat yang anti patriarki. Sedangkan PKK adalah alat Soeharto dalam mengkonsolidasikan kekuatan perempuan untuk mendukung pembangunan borjuasi kapitalis.

Selanjutnya, studi Dimas Dwi Kurnia tentang *Peranan Gerwani dalam Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961-1963* dalam *Mozaik: Jurnal Pendidikan Sejarah* (2019). Dalam studi ini ditemukan bahwa Gerwani telah berkomitmen untuk terlibat dalam pembebasan Irian Barat dengan menandatangani Piagam Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKSPM) pada 22 Desember 1957. Pertimbangannya adalah

Gerwani menolak kolonialisme Belanda di Irian Barat. Maka, Gerwani atas nama 710.000 anggotanya menuntut pemerintah agar menasionalisasi perusahaan asing dan merebut modal perusahaan Belanda di Irian Barat.

Aktivisme

McAdam (1999:118-120) menyebut bahwa aktivisme (kegiatan aktivis) merupakan upaya advokasi yang digerakkan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mencapai perubahan yang lebih besar meliputi sektor politik, ekonomi, dan sosial. Aktivisme dibentuk melalui koalisi individu/kelompok yang memiliki pikiran dan orientasi yang sama serta berprinsip militan untuk mengadvokasi kepentingan publik di hadapan umum (Dalton, 2003: 74).

Dalam konteks feminis, aktivisme dipicu oleh tiga faktor yaitu ketidakpuasan perempuan terhadap kondisi saat ini atau masa lalu, keinginan melakukan transformasi sosial yang egaliter, dan refleksi ke dalam diri (inter-personal) terkait perjuangan untuk perubahan. Aktivisme yang ideal membutuhkan alat, strategi, dan organisasi. Aktivisme adalah cara *survive* atau bertahan hidup perempuan dan perjuangan pelembagaan perubahan institusional (Griffin, 2005: 1-5).

Gerakan Feminis Sosialis

Gerakan feminis kiri memiliki visi emansipasi yang menekankan pada kelas dan keadilan rasial serta kesetaraan gender yang 'murni' (Landon Storrs, 2006: 50). Jayawerdana dan Kumar (1989: 2123-2126)

juga menjelaskan bahwa perjuangan feminis kiri tidak boleh tercerabut dari cita-cita pembebasan rakyat yakni transformasi secara total dan radikal, tidak terbatas pada perubahan patriarki ke matriarki, tetapi perjuangan perempuan yang melahirkan sistem sosialis-komunis di mana manusia bebas dari eksploitasi dan opresi penindasan.

Sejalan dengan Jayawardena, Nancy Hartsock dalam tulisan Berger (1988: 6-15) menyebutkan gerakan perempuan kiri ialah perjuangan yang didasarkan pada ketidakadilan perempuan akibat penindasan sistem kapitalisme dan budaya borjuis. Sehingga, perubahan harus bersifat revolusioner bukan reformatif. Spektrum dari perjuangan kelompok perempuan kiri adalah gerakan feminis sosialis.

Eksplorasi analisis kaum feminis sosialis perlu perlu menjangkau patriarki dan sistem reproduksi sosial. Di mana patriarki dihubungkan dengan perjuangan kelas, yang menempatkan setiap mode produksi sebagai struktur spesifik dikuasai oleh kelas tertentu, dalam mensubordinasi dan mengeksploitasi kelas lainnya (Millet, 1970: 169). Bagi gerakan feminisme sosialis, permasalahan-permasalahan perempuan pada prinsipnya merupakan bagian tak terpisahkan dari masalah sosial secara luas (Vogel, 2013: 100).

Teori Feminisme Marxis

Lise Vogel adalah seorang pemikir feminis Marxis. Ia dikenal dalam upayanya menyatukan teori (Unitary Theory System) antara analisis materialisme Marx dengan

pendekatan feminis. Menurut tesis Vogel (2013: 7-8) ada tiga interrelasi rumusan masalah dalam analisis feminis Marxis yaitu pertama, seluruh perempuan mengalami penindasan yang sama dibawah sistem kapitalisme, tidak hanya perempuan kelas pekerja. Bahkan, ada praduga bahwa di masyarakat sosialis sekalipun, perempuan mengalami subordinasi dan marginalisasi. Lalu sebenarnya, apa akar daripada penindasan perempuan?.

Kedua, dalam masyarakat cis-heteronormatif, jenis kelamin menentukan peran baik di sektor publik maupun di ranah domestik. Namun, perempuan yang 'dikodratkan' sebagai tenaga kerja reproduktif dalam rumah tangga, seringkali juga terlibat dalam kerja-kerja produksi di ruang publik. Jadi, apa hubungan pembagian peran dengan penindasan perempuan? Dan bukankah pembebasan perempuan seharusnya melampaui tuntutan keadilan pembagian peran?.

Ketiga, penindasan perempuan tidak tercerabut dari eksploitasi dan subordinasi masyarakat luas—ras, seksualitas, bangsa, agama, dan lain sebagainya—ada sifat penindasan yang saling berparalel. Namun, apakah penindasan perempuan memiliki kekhususan pengalaman? Dan bagaimana feminis Marxis mengkorelasikan pembebasan perempuan dengan perjuangan revolusioner sosialis. Maka secara eksplisit dan implisit, feminis Marxis penting menyatukan analisis penindasan perempuan tanpa meninggalkan paradigma berpikir tradisi Marxis revolusioner.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Menurut Creswell (2007: 44) penelitian kualitatif berangkat dari asumsi interpretatif atau teoritis yang objek penelitiannya adalah individu dan/atau suatu kelompok sebagai masalah penelitian. Dalam metode kualitatif, pendalaman kasus dilakukan dengan menggunakan cara-cara investigasi, pengumpulan data yang bisa saja sensitif akan emosionalitas objek penelitian, serta diperlukan analisis induktif dan deduktif dalam mencermati kasus.

Pengumpulan data berbasis studi pustaka dilakukan melalui pembacaan berbagai buku, majalah, atau literatur terkait yang menekankan pada komunikasi nilai-nilai tulisan secara tekstual (Mclaughlin, 1995:6). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa buku dan literatur tekstual lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi/telaah arsip. Dan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis interpretatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Gerwani di Bali

Pada tanggal 4 Juni 1950 di Semarang didirikan Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis), diinisiasi oleh Suharti Sumodiwirjo atau lebih dikenal Umi Sardjono, pejuang revolusi kemerdekaan yang belakangan menjadi anggota DPR-GR periode 60-65, S.K Trimurti, seorang jurnalis dan kelak menjadi Menteri Kementerian Perburuhan era Soekarno, serta Salawati Dawud, gerilyawan perang yang melawan

Kapten Westerling dan kemudian menjadi Walikota Makassar. Para pendiri lainnya adalah Sujinah dan Salami, pasukan bersenjata dan anggota Pemuda Puteri Indonesia yang berhaluan sosialis, Tris Metty dan Sri Panggihan yang merupakan anggota PKI Madiun, dan Suharti yang dikemudian hari menjadi ketua departemen perempuan *Comitte Central (CC)* PKI (Wieringa, 1999: 283-284).

Gerwis merupakan asosiasi organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri dari enam organisasi, yaitu: Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Istri Sedar dari Bandung, Wanita Madura dari Madura, Perjuangan Putri Republik Indonesia (PPRI), merupakan bagian dari Barisan Putri Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) yang berfokus di Jawa dan dipopulerkan oleh Soekarno (Wieringa, 1999: 283).

Berdasarkan Kongres I-II, perjuangan Gerwis melampaui tiga segi perjuangan yaitu pertama, segi politik, melawan kelompok-kelompok reaksioner. Kedua, segi feminisme, menolak perkawinan poligami dan memperjuangkan reformasi UU perkawinan dan menolak PP 19 (diskriminasi upah terhadap janda). Dan yang ketiga, segi daerah, membersamai tani dalam melawan tuan tanah dan mempertahankan hak tanahnya (Wieringa, 1999: 294).

Tahun 1954 Gerwis berubah nama menjadi Gerwani yang diketuai oleh Umi

Sardjono. Syarat menjadi anggota Gerwani cukup mudah dan tidak mengikat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: (1) Terbuka bagi seluruh perempuan Indonesia, minimal usia 16 tahun dan/atau sudah menikah; (2) Gerwani tidak mewajibkan syarat pemenuhan administrasi khusus seperti penandatanganan berkas tertentu untuk menjadi anggota; dan (3) Gerwani mengizinkan anggotanya memiliki rangkap organisasi. Persyaratan ini menjadi penegasan bahwa Gerwani bukan organisasi *onderbouw* dari partai politik tertentu (Wieringa, 1999: 299-303).

Metode perekrutan massa yang bersifat inklusif telah meningkatkan jumlah anggota Gerwani secara drastis. Tahun 1955 Gerwis memiliki 6000 anggota perempuan. Setelah berubah nama di tahun 1954 menjadi Gerwani, anggotanya mencapai 400.000 anggota (1955), 565.147 anggota (1956), dan Desember 1957 anggotanya berjumlah 663.740 perempuan. Gerwani mengklaim sebagai organisasi perempuan berbasis massa dengan keanggotaan terbesar di Indonesia. Namun demikian, angka ini perlu hati-hati untuk dilihat, menimbang sering adanya rangkap keanggotaan. Buruh perempuan di Kota biasanya menjadi anggota SOBSI, tetapi Ketika di desa bisa saja ia menjadi anggota Gerwani (Wieringa, 1999: 300-304). Berbeda dengan organisasi perempuan lainnya pada masa itu, sukarelawati (sukwati) Gerwani di berbagai daerah telah menggunakan baju seragam yang berwarna hijau dan biru sebagai bentuk profesionalitas keanggotaan (Amini, 2021: 79).

Gerwani telah mengalami perluasan pengorganisasian perempuan hingga ke daerah-daerah di Indonesia termasuk Bali. Dalam tulisan I Ngurah Suryawan (2018: 104) Gerwani di Bali sudah berdiri sejak tahun 1956. Ketuanya adalah Ida Ayu Rai Parmini, istri Giri Puger yang merupakan seorang pengusaha sekaligus pengurus PKI di Bali dan anggota MPR-RI. Parmini diwakili oleh Ni Ketut Kariasih, mantan pejuang revolusi pada masa kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang. Kariasih sempat ditangkap oleh tentara Belanda karena terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Ia dan suaminya, Pasek, adalah keluarga kelas menengah atas yang mengelola bisnis impor mobil dan usaha jahit. Kelak mereka menjadi anggota Komite Daerah Besar (CDB) PKI Bali (Alvania, 2015: 45-46).

Tahun 1960, Gerwani secara aktif memperluas kepengurusan cabang di seluruh kabupaten wilayah Bali (Suryawan, 2008: 106). Selain buruh dan tani, anggota Gerwani berasal dari berbagai kalangan—guru, pengusaha, bidan, penjahit, dan lain sebagainya. Keanggotaan Gerwani Bali juga tidak terbatas pada perempuan-perempuan PKI, namun juga dari beragam partai (Alvania, 2015: 46).

Perjuangan Gerwani Bali di Ranah Ekonomi-Politik

Perubahan Gerwis ke Gerwani telah merubah garis perjuangan gerakan dari organisasi kader menjadi gerakan massa luas, dari gerakan sosial menjadi gerakan politik. Berdasarkan laporan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerwani tahun 1954,

Gerwani telah mengaitkan urusan-urusan feminisme dengan kepentingan sosialisme. Hal ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi perempuan dalam sektor industri, masifnya perkawinan anak karena kemiskinan merajalela di desa-desa, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan kesulitan lainnya akibat sumber ekonomi [R]akyat dikuasi oleh pemodal besar (Wieringa, 1999: 300-301).

Upaya Gerwani dalam menyatukan analisis kekhususan pengalaman perempuan dan sosialisme sejalan dengan pikiran Jayawerdana dan Kumar (1989: 2123-2126) bahwa analisis kelas tidak dapat diabaikan dalam merumuskan problematika relasi gender dan ketidakadilan pengalaman perempuan. Konflik agraria di desa yang memperluas motivasi anak perempuan untuk menikah dini dan sistem kapitalisme dalam industri—upah murah terhadap perempuan serta pemecatan perempuan hamil tanpa pesangon menjadi *core* perjuangan Gerwani dalam menciptakan masyarakat sosialis yang egaliter dan perjuangan ini tidak eksklusif terhadap kepentingan perempuan saja.

Tercatat dalam dokumen Kongres II Gerwani tentang Tujuan dan Tugas Gerwani yang menggambarkan ideologi politik gerakan bahwa perjuangan kaum perempuan tidak boleh tercerabut dari kepentingan [Rakyat] luas, mengingat Indonesia masih dalam keadaan Setengah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF). Setengah Jajahan tercermin pada hasil Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang memberikan legitimasi kembali kepada

kolonial Belanda menguasai pabrik, lembaga keuangan, hingga sumber daya alam Indonesia. Dan status Setengah Feodal tergambar dari doktrin poligami di Indonesia dan kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, perlu solidaritas nasional patriotik antara gerakan perempuan, kaum tani, pemuda, dan buruh, serta kesatuan internasional (Wieringa, 1999: 302).

Zetkin dalam Vogel (2013: 117-120) memandang bahwa tidak ada agitasi khusus perempuan melainkan agitasi sosialis di kalangan perempuan. Namun pengutamaan sudut pandang perjuangan kelas, tidak dapat meminggirkan kekhususan penindasan perempuan. Melibatkan perempuan dalam revolusi sosialis, bermakna perempuan dijangkau sebagai makhluk politik. Keterlibatan massa besar perempuan proletar dalam perjuangan emansipasi proletariat adalah salah satu prasyarat untuk kemenangan gagasan sosialis dan pembangunan masyarakat sosialis, tanpa membedakan jenis kelamin, gender, seksualitas, dan kebangsaan.

Berangkat dari pemikiran ini, konsolidasi Gerwani bersama massa buruh, tani, dan masyarakat akar rumput lainnya, telah sesuai dengan kepentingan perempuan dalam revolusi sosialis, guna membebaskan masyarakat Indonesia dari sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Dalam konteks negara SJSF, Gerwani melihat kepentingan korporasi asing dan borjuasi nasional di Indonesia berperan dalam perampasan otonomi perempuan.

Di desa, masyarakat bergantung pada produksi tanah—alam sebagai sumber penghidupan. Hilangnya sumber penghidupan akibat perampasan dan monopoli lahan oleh pemodal besar telah meningkatkan kemiskinan dan anak-anak perempuan dinikahkan dini sebab kesulitan ekonomi. Kapitalisme di desa berkontribusi terhadap reproduksi tenaga kerja murah di kota. Akibatnya, buruh perempuan dalam kerja-kerja produksi industri rentan mengalami diskriminasi dan subordinasi.

Demi memutus rantai penindasan kapitalisme baik di desa maupun di kota, Gerwani Bali turut serta dalam pengorganisasian dan mendidik kaum tani di desa-desa. Gerakan Turun ke Bawah (Turba) atau *Turme* merupakan aktivitas Gerwani untuk menemui, mendidik, dan memberdayakan rakyat kecil—kaum buruh dan tani dengan menggunakan metode tiga sama (sama makan, sama kerja, sama tidur) atau juga bisa dilakukan dengan empat sama (sama makan, sama kerja, sama tidur + sama diskusi) (Suryawan, 2018: 108).

Gerwani Bali melakukan Turba ke pelosok-pelosok desa seperti di Desa Tangkas, Klungkung, dan Bangli. Tujuan utamanya adalah melawan monopoli tanah, dan mewujudkan cita-cita reformasi kebijakan politik tanah atau *land reform* yang berpihak pada petani miskin (Suryawan, 2018: 108). Gerakan Turba merupakan program kerja PKI yang turut dikerjakan oleh Gerwani dan keluarga komunis lainnya—Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia

(SOBSI), Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya.

Pada 17 Maret 1963 Gunung Agung di Karangasem meletus dan menewaskan setidaknya 1.900 korban jiwa. Kondisi ekonomi memburuk akibat hewan ternak banyak yang mati, hingga terjadi pencemaran air (Nasional Tempo.co, 17/23). Bersama dengan WDI, Gerwani turut memberikan bantuan kepada korban yang mengalami kerugian akibat gunung meletus tersebut (Suryawan, 2008: 110).

Aktivisme Gerwani Bali dalam memperjuangkan kebijakan reformasi tanah untuk [R]akyat sesuai dengan pemikiran Griffin (2005: 1-5) yang menyatakan bahwa aktivisme feminis dipicu oleh ketidakpuasan perempuan terhadap suatu kondisi dan berusaha melakukan agitasi demi perubahan. Sistem kapitalisme yang bercokol di negara SJSF Indonesia telah memicu gerakan perlawanan oleh Gerwani hingga ke pelosok-pelosok desa termasuk di Klungkung dan Bangli untuk membersamai petani dan terciptanya kebijakan redistribusi tanah yang adil bagi [R]akyat kecil.

Aktivitas Sosial-Kultural Gerwani Bali

Pada tahun 1950an, fokus perhatian Gerwani adalah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 dan mengakomodir kepentingan feminis meliputi advokasi kasus kekerasan seksual dan reformasi perkawinan (Wieringa, 1999: 308). Kemudian, dalam Sidang Pleno DPP Gerwani tahun 1961 ditetapkan dua kegiatan mendesak yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan tingkat lanjut, biro konsultasi nasional dalam rangka

membantu perempuan-perempuan di luar Jawa yang mengalami problematika perkawinan atau perceraian; (2) mempertinggi perekrutan Gerwani terhadap ibu rumah tangga (Wieringa, 1999: 325).

Feminisme Marxis melihat, inti material dalam hubungan sosial adalah perempuan, keluarga, dan seksualitas. Oleh karena itu, politik-ekonomi menjadi suprastruktur dalam pembentukan relasi seksual dan keluarga. Penarikan perempuan dari kerja-kerja reproduksi ke kerja produksi sosial, adalah progresif. Upaya ini merupakan penghancuran isolasi patriarkal dalam hubungan domestik yang sempit dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih unggul daripada imobilitas patriarki pra kapitalisme (Vogel, 2013: 117-123).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, sistem SJSF Indonesia berperan dalam membentuk relasi keluarga patriarkal. Budaya masyarakat setengah feodal, mendudukan perempuan sebagai mesin pencetak anak—banyak istri, banyak anak, banyak rezeki. Indonesia yang juga masih berstatus negara setengah jajahan, memfungsikan perempuan untuk mereproduksi tenaga kerja sesuai kepentingan industri korporasi. Maka, upaya Gerwani dalam menarik perempuan utamanya ibu rumah tangga ke pergerakan nasional, merupakan metode aktivisme progresif. Dengan bergerak, perempuan dapat membebaskan dirinya dari kungkungan budaya patriarkal, dan menjadi agen revolusioner untuk pembebasan nasional.

Salah satu cara membebaskan perempuan dalam rumah tangga yang patriarki-feodal adalah mempertinggi kesadarannya tentang hak-hak mereka sebagai perempuan. Kariasih mengkonsolidasi para perempuan Bali melalui pertemuan-pertemuan arisan. Para ibu-ibu yang anak-anaknya belajar di sekolah binaan Gerwani diajak berkumpul dan melakukan arisan. Dalam pertemuan tersebut dilakukan dengar pendapat mengenai pengalaman perempuan yang satu dengan perempuan lainnya. Pernah suatu waktu, Kariasih mendapatkan aduan pelanggaran hak dari seorang istri di mana suaminya tidak memberikan nafkah ekonomi, maka Gerwani Bali memberikan somasi surat kepada laki-laki itu untuk memenuhi tanggungjawabnya (Suryawan, 2018: 105).

Selain pelanggaran hak ekonomi, Kariasih juga membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai pimpinan Gerwani, Kariasih menemui pelaku KDRT tersebut dan memberikan pemahaman bahwa istri juga mengalami kesulitan ketika kerja-kerja rumah tangga hanya dibebankan kepada perempuan, oleh karena itu penting agar tidak semena-mena kepada istri. Selain KDRT, Kariasih juga mendampingi korban perkosaan di Badung yang sempat tidak diproses kasusnya oleh kepolisian (Suryawan, 2018: 105-106).

Lenin dalam Vogel (2013: 126) menyebut, dibawah sistem kapitalisme, perempuan mengalami penindasan ganda. Pertama, perempuan dimarjinalkan karena

ketidaksetaraan politik dan hukum. Kedua, perempuan menjadi 'budak' dalam rumah tangga—yakni kerja-kerja reproduksi tidak dikolektifkan bersama, melainkan hanya dibebankan kepada perempuan, dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Walaupun pemenuhan hak politik sudah dilakukan, namun perempuan tetap tidak bebas dari beban kerja rumah tangga. Maka dari itu, penindasan kedua lebih utama, daripada penindasan pertama.

Berdasarkan pemikiran Lenin, aktivisme Gerwani Bali dalam melawan KDRT, perkosaan, dan bentuk ketidakadilan lainnya dalam rumah tangga, telah sesuai dengan perjuangan sosialis melawan kapitalisme. Selain membersamai massa tani dan buruh, Gerwani juga tidak meminggirkan kekhususan pengalaman perempuan. Akibat ditindas dibawah kapitalisme dan budaya patriarki, perempuan rentan mengalami opresi berlapis. Dalam konflik agraria, perempuan dimiskinkan karena monopoli lahan untuk kepentingan korporasi. Sedangkan di kota, buruh perempuan diupah murah oleh perusahaan. Dan kedua perempuan ini, rentak menjadi objek kekerasan berbasis gender baik di dalam keluarga maupun ranah publik,

Gerwani Bali juga gencar membuka sentra-sentra pendidikan untuk anak-anak dengan menjalankan program pemberantasan buta huruf melalui pembangunan Taman Kanak-Kanak (TKK) Melati di kabupaten Bangli dan Badung. Sekolah anak tersebut terbuka untuk umum

dan tidak terbatas bagi anak-anak anggota Gerwani saja. Ada beberapa anak-anak anggota Wanita Demokrat Indonesia (WDI) dan anggota Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang disekolahkan di TKK Melati. Anak-anak yang belajar di TKK Melati tidak perlu membayar. Adapun gaji para guru di TKK tersebut berasal dari sumbangan disesuaikan dengan kemampuan orang tua para murid yang mapan secara ekonomi (Suryawan, 2018: 106-107).

Aktivisme feminis di sektor pendidikan perempuan dan anak merupakan bagian dari gerakan emansipasi sosial dan bentuk pengembangan diri. Kunci pembangunan dalam masyarakat terletak pada pemberdayaan serta kemajuan perempuan dan anak (Griffin, 2005: 85). Nasionalisme Gerwani dapat dilihat dari bagaimana kontribusinya dalam membangun bangsa (*nation building*) pasca kemerdekaan. Peran pembangunan bangsa ini berupa perluasan akses pendidikan bagi anak-anak melalui pendirian TKK Melati hingga ke berbagai pelosok desa. Sentra-sentra sekolah anak Gerwani berjalan dengan didukung solidaritas kolektif antar anggota maupun sumbangan orang tua murid.

Anak-anak TKK Melati dididik berbagai kesenian seperti latihan menari, menyanyi, dan bermusik dalam program Taman Minggu Melati. Tidak hanya anak-anak yang difokuskan belajar kesenian, Gerwani juga mengembangkan kemampuan perempuan kalangan remaja dan yang sudah bekerluarga untuk mengikuti kursus menjahit, paduan suara, tari-tarian seperti Tari Janger, tarian tentang tani, tarian dari

India. Dan belajar alat musik seperti angklung dan gamelan. Gerwani dalam beberapa kesempatan akan melakukan pementasan seni di Lapangan Puputan Badung dan di beberapa desa lainnya seperti Desa Sempidi, Mengwi, Beringkit, dan Buduk (Suryawan, 2018: 106-107).

Perasaan solidaritas dalam aktivisme sosial dapat muncul, terbentuk, dan mengakar, apabila sebuah gerakan mampu menerjemahkan kepentingan, minat, dan potensi objektif dari konsensus masyarakat (Tarrow, 2011:11). Dalam rangka menarik minat keanggotaan, Gerwani melakukan pendekatan massa melalui kebudayaan. Keseniaan menjadi salah satu strategi untuk memperluas kader, dan kemandirian ekonomi gerakan, beserta anggotanya. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi medium pengembangan diri, namun juga menjadi alat politik dalam mengorganisir, mendidik, dan untuk kepentingan perjuangan sosialisme Gerwani.

Aktivisme Gerwani Bali yang juga sangat berkontribusi penting terhadap kehidupan ibu rumah tangga, adalah didirikannya yayasan penitipan anak untuk membantu pedagang perempuan yang berjualan di pasar (Alvania, 2015: 50). Flora dalam (Rueda, Marisa, dkk, 2007) menyebutkan program feminisme sosialis yaitu: pertama, kaum sosialis (gerakan buruh) menyumbangkan dana emansipasi untuk kaum buruh itu sendiri. Kedua, dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas kolektif berbasis swakelda seperti rumah sakit, panti jompo, sekolah, yayasan untuk anak, dan lainnya. Maka

perempuan bisa mendapatkan emansipasi mereka dalam 'kolektif persatuan' ini. Aktivisme untuk membangun layanan kolektif tersebut telah dijalankan oleh Gerwani di Bali sesuai dengan prinsip-prinsip feminisme sosialis.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menjadi bukti jejak historis aktivisme Gerwani Bali dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kepentingan massa luas selama kepemimpinan Soekarno tepatnya tahun 1956-1965. Aktivitas Gerwani tidak lepas dari ideologi feminis Marxis dan pengaruh gerakan feminis sosialis yang menolak ketercerabutan gerakan perempuan dengan kepentingan massa luas. Melalui penyatuan gagasan penolakan sistem kapitalisme dan anti budaya patriarki, perjuangan Gerwani menjangkau berbagai lapisan meliputi perempuan dan kelompok marjinal seperti buruh dan tani.

Di Bali, Gerwani melawan monopoli lahan dengan turun langsung ke desa agar lebih dekat dengan rakyat kecil dan mendidik kaum tani. Dan memberdayakan perempuan lewat kumpul arisan, advokasi kasus pelanggaran hak-hak rumah tangga dan kasus kekerasan seksual, penyediaan penitipan anak di Pasar Badung, mendidik anak-anak melalui TKK Melati, dan internalisasi cinta kebudayaan lokal lewat sentra-sentra seni.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvania, Ribkah, dkk. (2015). *Prison Songs: Nyanyian yang Dibungkam*. Denpasar: Taman 65.
- Amini, Mutiah. (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aripurnami, Sita, dkk. (2013). *Indonesian Women's Movement: Making Democracy Gender Responsive*. Jakarta: Women Research Institute.
- Arivia, Gadis, Subono, N Iman. (2017). *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia: Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Cain, Bruce, Russell J. Dalton, and Susan Scarrow, eds. (2003). *Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Griffin, Gabriele. (2005). *Feminist Activism in 1990*. London: Taylor & Francis e-Library.
- John W. Creswell. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, third edition*. London: Sage Publication.
- McLaughlin, Thomas. (1995). *Critical Terms for Literary Study*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Millett, Kate. (1970). *Sexual Politics*. New York: Doubleday and Co.
- Rueda, Marisa, Rodriguez, Marta, dkk. (2007). *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Suryawan, I Ngurah. (2018). *Mencari Bali yang Berubah*. Yogyakarta: BASABASI.
- Tarrow, Sidney. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious*

Politics. New York: Cambridge University Press.

Vogel, Lise. (2013). *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory*. Leiden: Koninklijke Brill NV.

Wieringa, Saskia E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta; Garba Budaya dan Kalyanamitra.

Jurnal

- Afifi, Irza, Kristianwantoni, S. (2019). Gerwani in the Communist Ideology of 1950-1965. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan & Humaniora*. Vol. 3, No.1, pp. 10-20.
- Berger, Brigittie. (1988). *Academic Feminism and the Left*. *Academic Questions*. Vol.1. No.2. Pp.6-15.
- Jayawerdana, Kumari, Kelkar, Govind. (1989). *The Left and Feminism*. *Economic and Political Weekly*. Vol. 24. No. 38. Pp. 2123-2126.
- Kurnia, Dimas D, Miftahuddin. (2019). *Peran Gerwani dalam Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961-1963*. *Mozaik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol.10, No.2. DOI: 10.21831/moz.v10i2.32463.
- McAdam, "The Biographical Impact of Activism" (1999: 118–22), and on the more detailed analysis in McAdam, Van Dyke, Munch, and Shockey, "Social Movements and the Life-Course" (1998).
- McGregor, K. (2012). *Indonesian Women, The Women's International Democratic Federation and The Struggle for Women's Rights: 1946-1965*. *Indonesia and the Malay World*, Vol.40, No. 117, Pp. 193-208. DOI:10.1080/13639811.2012.683680.
- Storrs, Landon. (2006). *Left-Feminism, the Consumer Movement, and Red Scare Politics in the United States (1935-*

1960). *Journal of Women's History*.
Vol.18, No.3, pp. 40-67.

Wieringa, S. E. (1993). *Two Indonesian women's organizations: Gerwani and the PKK*. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. Vol.25, No.2, Pp. 17-30. DOI: 10.1080/14672715.1993.10416112.

Website

Ananda, R Catur. 2023. *Letusan Dahsyat Gunung Agung 60 Tahun Lalu, Ribuan Orang Meninggal Dunia*. [Letusan Dahsyat Gunung Agung 60 Tahun Lalu. Ribuan Orang Meninggal Dunia - Nasional Tempo.co](#)